

BAB 1

PENDAHULUAN

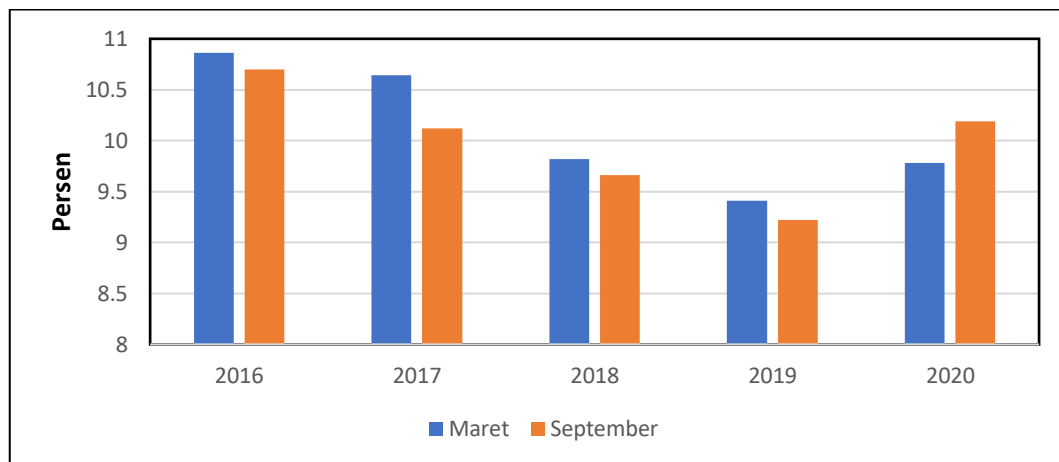
1.1 Latar Belakang

Penduduk miskin adalah penduduk yang hidup dalam keadaan kurang nutrisi dan kesehatan yang buruk, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hidup di wilayah-wilayah yang memiliki lingkungan buruk, dan memperoleh penghasilan yang rendah (Todaro & Smith, 2011). Menurut Mardiyana dan Ani (2019), cerminan tinggi rendahnya angka kemiskinan pada sebuah negara menjadi tolak ukur kemakmuran masyarakat di negara itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga terkait dengan berbagai dimensi kehidupan manusia seperti jaminan kesehatan, pendidikan dan masa depan.

Sukiyono et al. (2019), menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang. Negara yang dapat dinilai sebagai negara berkembang dapat dilihat dari tingkat pengetahuan dan teknologi yang dikuasai masyarakat, angka pengangguran yang tinggi, serta rendahnya tingkat pendapatan perkapita. Negara berkembang harus dapat berupaya ekstra dalam pengentasan tingginya tingkat kemiskinan, salah satunya negara Indonesia.

Data kemiskinan di Indonesia masih menggambarkan tingginya tingkat kemiskinan yang ada. Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan data pada 5 tahun terakhir memiliki jumlah penduduk miskin di bulan September tahun 2019 sebesar 25144,72 ribu jiwa yang dalam persentasenya sebesar 9,22 persen

dan meningkat pada bulan September tahun 2020 sebesar 27549,69 ribu jiwa yang dalam persentasenya sebesar 10,19 persen.



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2016-2020

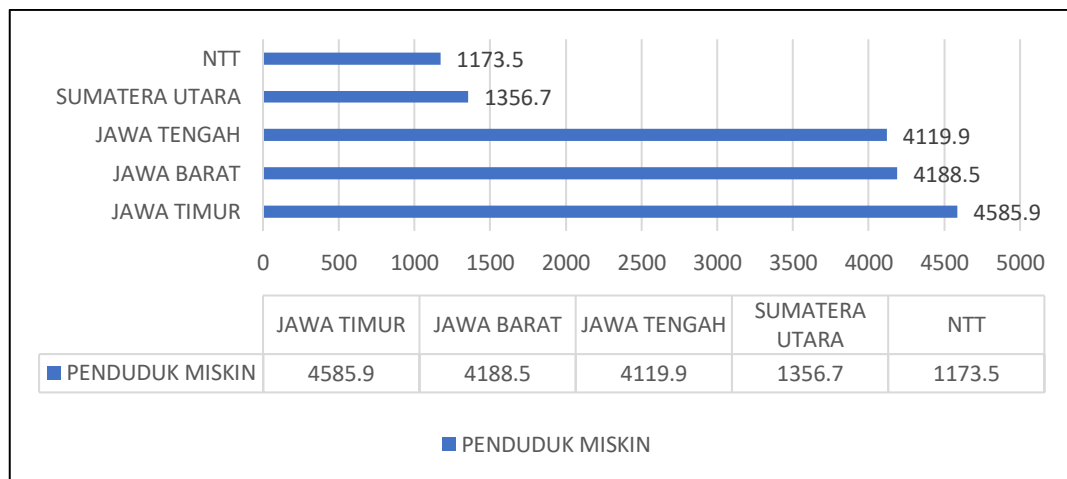
Sumber: BPS (2020)

Pemerintah pusat melakukan segala upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta atas dukungan kerjasama masyarakat untuk dapat mencari penyebab utama kemiskinan dan berusaha memanfaatkan segala faktor yang dimiliki dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Tak hanya pemerintah pusat, hal tersebut juga menjadi tugas utama bagi pemerintah daerah maupun Provinsi dalam mendukung upaya pembangunan ekonomi, salah satunya pengentasan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan agenda penting pemerintah agar fungsi pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dapat tercapai dengan baik (Lantik et al., 2018).

Pembangunan diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk (Todaro & Smith, 2011). Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan yang ingin dicapai. Pembangunan

harus dipandang sebagai proses multidimensi yang meliputi perubahan mendasar pada struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional dengan tetap mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Runtunuwu & Tanjung, 2010).

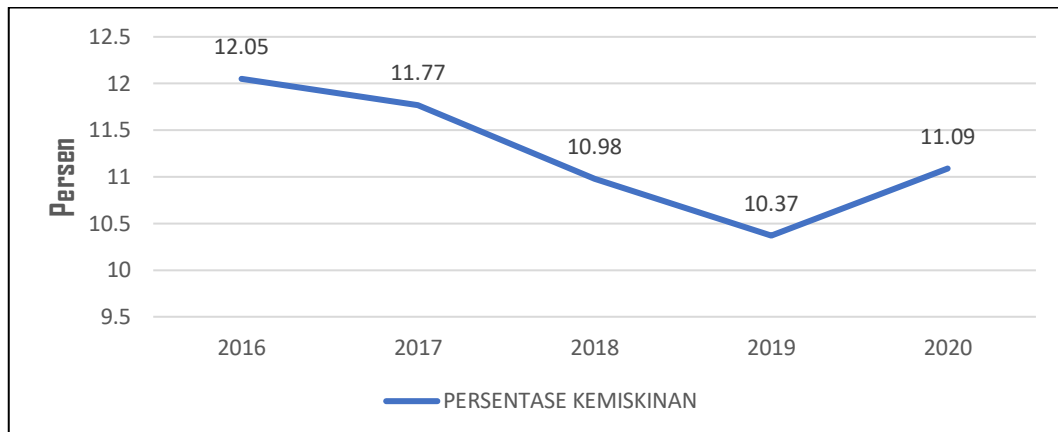
Data jumlah penduduk miskin yang tercatat dalam BPS Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 4585,9 ribu jiwa pada bulan September 2020, hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Provinsi dengan Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Tertinggi di Indonesia

Sumber: BPS (2020)

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di mana hal itu memberikan pengaruh bahwa semakin banyak penduduk miskin maka angka kemiskinan dalam daerah tersebut semakin meningkat. Tingkat kependudukan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor besarnya angka kemiskinan di Jawa Timur. Berikut data persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020:



Gambar 1.3 Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Jatim (2020)

Persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sebesar 12,05 persen selalu terjadi penurunan, sementara pada besaran presentase terendah pada tahun 2019 yaitu mencapai 10,37 persen. Tingkat angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 yaitu sebesar 11,09 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya pemerintah provinsi Jawa Timur terus berupaya dalam penanganan atau pengentasan kemiskinan dengan harapan terus terjadi penurunan persentase kemiskinan tersebut.

Perkembangan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 (Maret) persentase kemiskinan terendah terdapat pada sebagian besar wilayah perkotaan diantaranya Kota Batu sebesar 3,81 persen dan Kota Malang sebesar 4,07 persen sedangkan tingkat tertinggi penduduk miskin berada di Kabupaten-kabupaten wilayah Madura dan daerah tapal kuda, diantaranya Kabupaten Sampang sebesar 20.71 persen, Kabupaten Sumenep sebesar 19,48 persen, Kabupaten Bangkalan sebesar 18,90 dan Kabupaten Probolinggo sebesar 17,76 persen.

Mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah ataupun negara, perlu diketahui beberapa faktor yang berhubungan dan berpengaruh tinggi terhadap tinggi rendahnya tingkat kemiskinan tersebut, sehingga dapat diterapkan sebuah kebijakan sosial maupun ekonomi secara efektif dengan harapan dapat berkurangnya tingkat kemiskinan yang terjadi. Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah (Tisniwati, 2012).

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satunya adalah penurunan atau pengentasan kemiskinan di suatu daerah bahkan negara, karena berkurangnya penduduk miskin dapat menjadi salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Hal ini membuat setiap negara harus terus berupaya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang selaras. apabila suatu negara tidak meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang baru seperti tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi (Ningsih & Andiny, 2021).

Penelitian Febriaty dan Nurwani (2020), mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan optimal dan akan terhambat oleh ketidakmerataan pendapatan. Ketidakmerataan distribusi pendapatan tersebut juga akan memberikan dampak instabilitas sosial. Distribusi pendapatan yang tidak merata memicu terjadinya ketimpangan pendapatan, hal tersebut akan menjadi awal munculnya kemiskinan yang tidak akan baik apabila dibiarkan berlarut-larut.

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu hal yang berkaitan erat di dalam pendistribusian pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di suatu negara ataupun daerah. Semakin rendah distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi, ataupun sebaliknya. Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Besarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan (Damanik *et al.*, 2018).

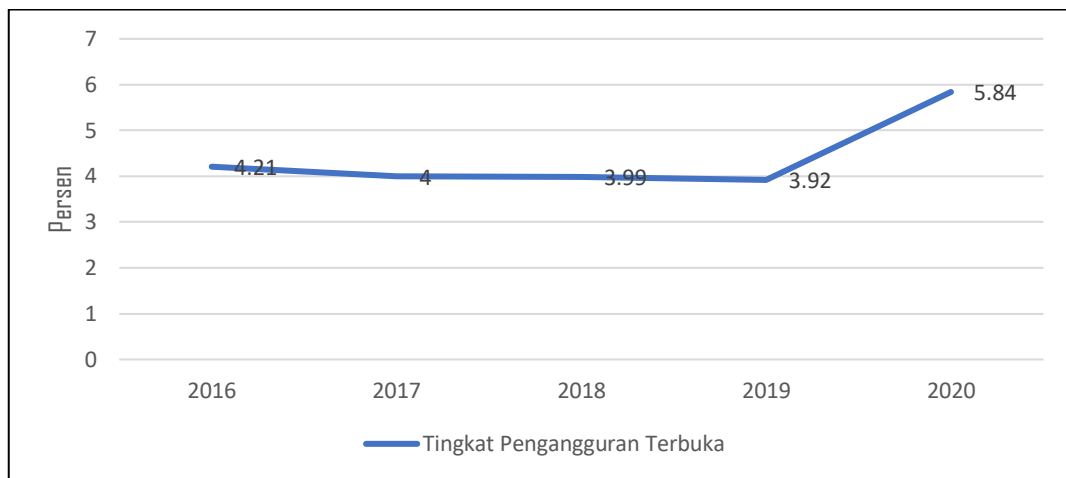
Distribusi pendapatan dikatakan adil apabila seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil akan produksi nasional, sehingga masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan yang rendah dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Namun, faktor tersebut juga sering tidak diperhitungkan dalam upaya membandingkan tingkat kesejahteraan hingga perubahannya dari waktu sekarang ke waktu yang akan datang. Tolak ukur kesejahteraan masyarakat dapat diperhatikan pada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita yang diperoleh masyarakat pada suatu negara (Arsyad, 2017).

Pendidikan juga memiliki peran penting dalam permasalahan kemiskinan. Pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan dan diakui secara luas terhadap pengembangan bagian masyarakat yang miskin serta memberikan arti penting bagi kesejahteraan dan kemandirian individu, sehingga pendidikan terus dikembangkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian David *et al.*, (2006), yang menyatakan bahwa pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Faktor penyebab lainnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang mempengaruhi orang-orang secara langsung dan parah. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar hidup dan tekanan psikologis (Mankiw, 2019). Pengangguran memiliki dampak buruk terhadap nilai kesejahteraan individu itu sendiri. Badan Pusat Statistik dalam mengukur pengangguran menggunakan indikator kinerja pada tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Semakin tinggi tingkat pengangguran maka makin tinggi pula tingkat kemiskinan yang dihadapi suatu daerah. Berkurangnya minat yang disebabkan oleh pengangguran akan menyebabkan meningkatnya peluang untuk jatuh miskin (Choirur et al., 2021). Mankiw (2019), menyatakan bahwa tidak mengherankan bahwa pengangguran sering menjadi topik perdebatan politik berbagai politisi dengan kebijakan yang mereka usulkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Data grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia meningkat drastis pada tahun terakhir, termasuk pada data grafik di Provinsi Jawa Timur. Terlihat pada grafik tingkat pengangguran terbuka dibawah ini:



Gambar 1.4 Persentase TPT Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Jatim (2020)

Persentase tingkat pengangguran terbuka yang tercatat pada data BPS Provinsi Jawa Timur menunjukkan pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 4,21 persen. Selanjutnya pada tahun 2017-2020 kondisi TPT di Jawa Timur menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,00 persen (2017); 3,99 persen (2018) dan 3,92 persen (2019). Namun, tercatat pada akhir tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan drastis sebesar 5,84 persen.

Faktor-faktor kemiskinan yang telah diuraikan sebelumnya bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953 yang menyatakan bahwa suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

Khurri (2012) juga mencantumkan teori tersebut dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa, adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal dapat menyebabkan rendahnya produktivitas, dimana hal

tersebut juga akan berpengaruh hingga mengakibatkan pula rendahnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi sehingga berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Maisyarah (2015), mengkaji mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberikan informasi faktor-faktor yang dapat digunakan untuk membangun kualitas manusia, indikator tersebut di antaranya pendidikan dan Kesehatan. Seran (2017), menganalisis hubungan pendidikan dan pengangguran dengan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan cara yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi akan menciptakan investasi baru dan lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan. Ebunoluwa dan Yusuf (2018), mengkaji bahwa dalam mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus lebih terarahkan pada penduduk yang miskin.

Penelitian di atas dapat ditemukan beberapa *research gap* yaitu perlu adanya analisis terhadap variabel faktor-faktor yang memiliki hubungan pengaruh terhadap kemiskinan, dengan menambahkan variable ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berkontribusi dengan baik apabila tidak disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga ketimpangan pendapatan diperlukan dalam mengambil kebijakan pemerataan distribusi pendapatan yang lebih adil sehingga masyarakat lebih sejahtera. Oleh karena itu, diperoleh judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2011-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020?
4. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.
4. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi peneliti, dapat memperoleh gambaran mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.
3. Bagi pemerintah, dapat memperoleh gambaran untuk dilakukannya penentuan serta menerapkan kebijakan yang tepat dalam upaya permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.